



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) KECAMATAN WEDARIJAKSA KABUPATEN PATI TAHUN 2021



**Jl. Raya Pati - Tayu KM. 09 Telp. (0295) 383183
Kode Pos : 59152**

**Email : [wedarijaksakecamatan@gmail](mailto:wedarijaksakecamatan@gmail.com)
Website : kecamatanwedarijaksa.patikab.go.id**

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas Perkenan dan Rahmatnya, kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati Tahun 2021.

Penyusunan LKjIP Kecamatan Wedarijaksa Tahun 2021 ini merupakan kewajiban semua SKPD dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kecamatan Wedarijaksa.

Dalam menyusun LkjIP ini kami mengukur nilai efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabel berdasarkan Rencana Kerjadan Penetapan Kinerja Kecamatan Wedarijaksa Tahun 2021.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati yang dapat kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wedarijaksa, Februari 2022

CAMAT WEDARIJAKSA



EKO PURWANTORO, S.Sos

Pembina Tk. I

NIP. 19700501 199101 1 002

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Data Umum Organisasi	1
C. Struktur Organisasi	2
D. Sumber Daya.....	2
E. Kondisi Geografis	3
F. Sistematika Penyajian LKjIP	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Indikator Kinerja	8
B. Perjanjian Kinerja	10
C. Rencana Anggaran	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	15
B. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja.....	16
C. Akuntabilitas Keuangan.....	27
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	33
B. Strategi Peningkatan Kinerja.....	33
C. Pemecahan Masalah.....	34

LAMPIRAN :

1. Struktur Organisasi
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

DAFTAR TABEL

- **Tabel 1.1** Data Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Kecamatan Wedarijaksa
- **Tabel 2.1** Perjanjian Kinerja per Sasaran Pembangunan Tahun Anggaran
- **Tabel 3.1** Alokasi Anggaran per sasaran Kecamatan Wedarijaksa Tahun 2021
- **Tabel 3.2** Capaian Kinerja Meningkatkan Keamanan dan ketertiban masyarakat
- **Tabel 3.4** Data Meningkatkan Keamanan dan ketertiban masyarakat
- **Tabel 3.5** Pengukuran Kinerja persentase penyerapan anggaran bantuan keuangan
- **Tabel 3.6** Perbandingan Kinerja persentase penyerapan anggaran bantuan keuangan
- **Tabel 3.7** Data Lembaga Kemasyarakatan Desa
- **Tabel 3.8** Perbandingan Jumlah Lembaga Masyarakat Desa se Kecamatan Wedarijaksa
- **Tabel 3.9** Pengukuran Kinerja Meningkatkan Kemandirian
- **Tabel 3.10** Pengukuran Kinerja Prosentase Penye Desa
- **Tabel 3.12** Target Kinerja Prosentase Penyerapan Bantuan Keuangan Desa Tahun 2020 – 2021
- **Tabel 3.13** Perbandingan Capaian Capaian Kinerja Meningkatnya Pendapatan Daerah Tahun 2020
- **Tabel 3.14** Data Pelayanan Perijinan Paten Kecamatan Wedarijaksa Tahun 2021
- **Tabel 3.16** Pelayanan Perijinan Paten Kecamatan Wedarijaksa Tahun 2021
- **Tabel 3.17** Perbandingan Pelayanan Perijinan Paten Kecamatan Wedarijaksa Tahun 2021
- **Tabel 3.18** Data Pelayanan KTP dan KK
- **Tabel 3.18** Perbandingan Prosentase Data Pelayanan KTP dan KK
- **Tabel 3.19** Prosentase Penyelesaian Pelayanan KTP dan KK

- **Tabel 3.20** Terpenuhinya Data dan Informasi serta peran masyarakat dalam perencanaan pembangunan
- **Tabel 3.21** Capaian Kinerja Meningkatnya hasil Perencanaan Pembangunan
- **Tabel 3.22** Tepenuhinya Tertib administrasi Pelaporan Keuangan Desa se Kecamatan
- **Tabel 3.23** Pencapaian Realisasi PBB Kecamatan Wedarijaksa tahun 2021
- **Tabel 3.23** Realisasi Anggaran dan Belanja Daerah Kecamatan Wedarijaksa Tahun 2021
- **Tabel 3.24** Perbandingan Realisasi Anggaran dan Belanja Daerah Kecamatan Wedarijaksa Tahun 2021

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Wedarijaksa Tahun 2020 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tersebut dinyatakan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja yang disusun secara periodik.

B. Data Umum Organisasi

1.1. Dasar Hukum

Kecamatan Wedarijaksa dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Pati.

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok

Tugas Pokok Kecamatan berdasarkan pada Peraturan Bupati Pati Nomor 35 Tahun 2008 yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

b. Fungsi

- 1). Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 2). Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

- 3). Pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- 4). Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- 5). Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- 6). Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan; dan
- 7). Pelayanan Masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa atau Kelurahan;

C. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Kecamatan Wedarijaksa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan terdiri dari :

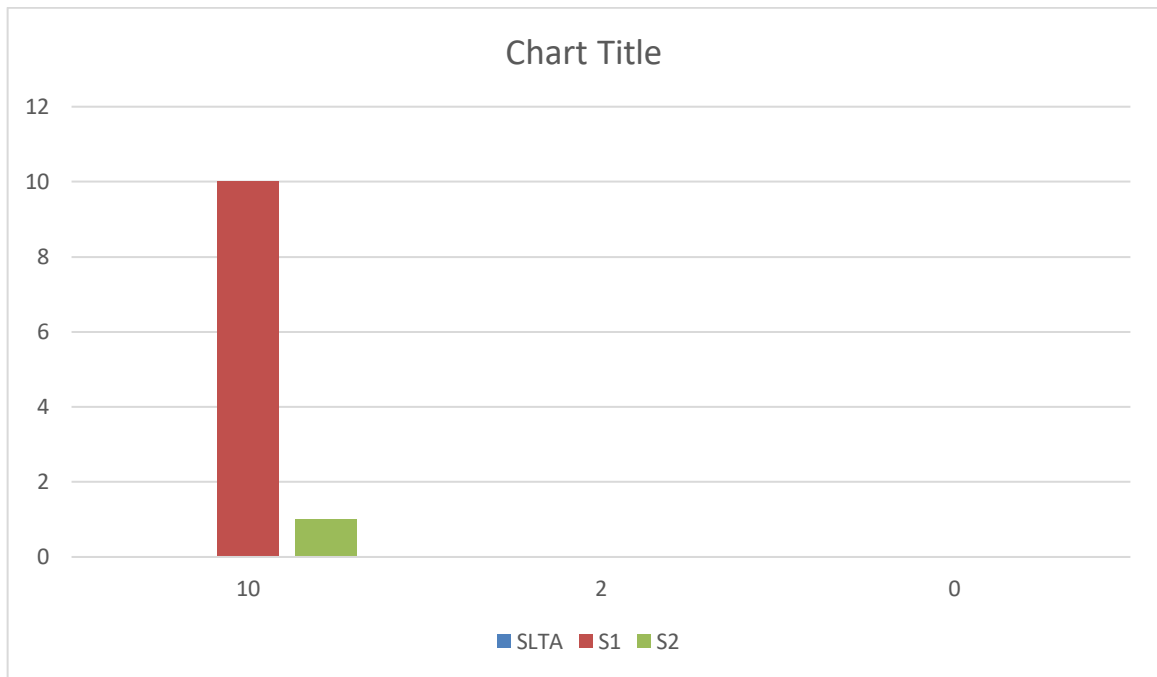
1. Camat
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Subbag Program dan Keuangan
 - b. Subbag Umum dan Kepegawaian
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
6. Seksi Pelayanan
7. Seksi Kesejahteraan Sosial

Adapun Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Wedarijaksa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan adalah sebagaimana *lampiran 1*.

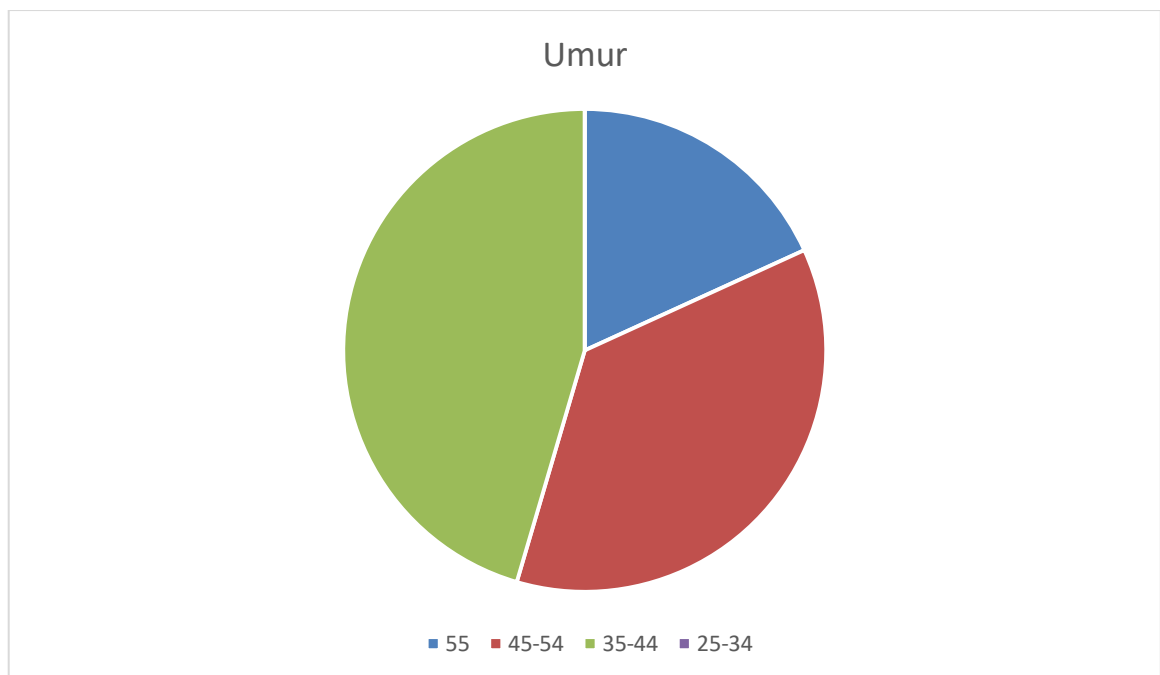
D. Sumber Daya

Sumber daya manusia yang dimiliki OPD Kecamatan Wedarijaksa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebanyak 11 personel Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdiri dari 4 orang PNS berjenis kelamin laki-laki (44%) dan 7 orang PNS berjenis kelamin perempuan

(56%). Jika dilihat dari jenjang pendidikan terdapat 1 PNS dengan pendidikan S2, 10 orang berpendidikan S1.



Jika dilihat dari usia karyawan Kecamatan Wedarijaksa terdapat 2 orang dengan usia >55, 5 orang PNS dengan usia >45 s.d 54, 4 orang dengan usia >35 s.d 44, dan 0 orang dengan usia >25 s.d 34.



E. Kondisi Geografis

a. Batas Administrasi

Kecamatan Wedarijaksa terletak 09 Km dari ibukota Kabupaten ke arah utara, luas wilayah Kecamatan Wedarijaksa adalah 40,85 km²

dengan ketinggian terendah 1mdpl dan tertinggi 36 mdpl. Kecamatan Wedarijaksa merupakan salah satu dari 21 daerah Kecamatan di Kabupaten Pati mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kecamatan Trangkil dan Laut Jawa
 Sebelah Timur : Kecamatan Juwana dan Laut Jawa
 Sebelah Selatan : Kecamatan Pati
 Sebelah Barat : Kecamatan Tlogowungu

b. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk

Wilayah administrasi serta jumlah penduduk desa se- Kecamatan Wedarijaksa Tahun 2021 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.1
 Data Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk
 Kecamatan Wedarijaksa Tahun 2021

No.	Desa	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Penduduk
1	Bumiayu	311	4.563
2	Margorejo	230	1.855
3	Sukoharjo	348	6.533
4	Tawangharjo	237	2.670
5	Ngurensiti	271	3.582
6	Bangsalorejo	160	2.278
7	Tluwuk	423	2.683
8	Sidoharjo	180	2.350
9	Ngurenrejo	174	3.212
10	Jontro	118	2.969
11	Panggungroyom	206	4.570
12	Suwaduk	321	3.516
13	Wedarijaksa	278	8.175
14	Pagerharjo	206	3.966
15	Jatimulyo	101	2.335
16	Jetak	54	1.722
17	Kepoh	201	1.834
18	Tlogoharum	266	4.712
	Jumlah	4.085	63.525

Sampai Tahun 2021 wilayah administrasi Kecamatan Wedarijaksa terdiri dari 18 Desa, 25 dukuh, 58 RW dan 339 RT. Semua desa masuk ke dalam kategori Desa Swasembada. Jumlah penduduk terbanyak adalah Desa Wedarijaksa sebesar 8.175 jiwa. Adapun desa

dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu Desa Jetak sebesar 1.722 jiwa.

Dalam rangka merespon dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik, serta untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan kondisi geografis daerah, peran kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik telah diatur melalui Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Kewenangan yang dilimpahkan meliputi :

- Pelayanan Perizinan
- Pelayanan non Perizinan

Pelayanan Perijinan meliputi Ijin Mendirikan Bangunan, Ijin Usaha Perdagangan Mikro, Tanda Daftar Perusahaan, Ijin Reklame, Ijin Pengumpulan Dana dan Ijin Menutup Jalan.

Pelayanan non-Perijinan meliputi SKCK, Ijin Keramaian dan Inspeksi ke lapangan terkait HO.

G. Sistematika Penyajian LKjIP

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati 2020 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati kepada publik atas kinerja pencapaian visi dan misinya pada Tahun Anggaran 2021. Selain itu, LKjIP juga merupakan salah satu parameter yang digunakan oleh Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Penyusunan LKjIP Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati ini berdasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang OPD Kecamatan Wedarijaksa, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

- Bab II : Perencanaan Kinerja;

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2021.

- Bab III : Akuntabilitas Kinerja

- a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Kecamatan Wedarijaksa untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kecamatan Wedarijaksa. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2021
3. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2018, 2019,2020 dan 2021
4. Membandingkan realisasi kinerja Tahun 2018, 2019 2020 dan 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kecamatan Wedarijaksa.
5. Membandingkan realisasi kinerja Tahun 2021 dengan standart nasional (jika ada)
6. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah di lakukan
7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan ditambahkan solusi kegagalan atau penurunan kinerja sebagai bentuk rencana aksi dari setiap strategis

- a. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan

kinerja Kecamatan Wedarijaksa sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

- Bab IV : Penutup.

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Kecamatan Wedarijaksa serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2021
2. Lain-lain

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Sejalan dengan visi jangka panjang Kabupaten Pati seperti yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pati Tahun 2005-2025” PATI BUMI MINA TANI SEJAHTERA ” dan visi pembangunan daerah Kabupaten Pati seperti yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati Tahun 2017-2022” Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik ”, maka OPD Kecamatan Wedarijaksa telah menetapkan visi” Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik ” dalam Rencana Strategis Kecamatan Wedarijaksa Tahun 2017-2022.

A. Indikator Kinerja

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah harus menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama adalah hal utama apa yang akan diwujudkan atau untuk mewujudkan apa instansi pemerintah dibentuk dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi pemerintah. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaranstrategis instansi pemerintah, sehingga IKU (*Key Performance Indicator*) adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) instansi Kecamatan Wedarijaksa mengacu pada tujuan dan sasaran dalam RPJMD ”Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan prima sesuai kebutuhan dengan prinsip *good governance*”

Untuk mendukung tujuan dan sasaran tersebut indicator kinerja utama yang digunakan instansi Kecamatan Wedarijaksa yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2021 yaitu :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2021

NO	Tujuan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat di wilayah kecamatan	Persentase penanganan pelanggaran K3 di Kecamatan	100%
2.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	Persentase pos Kamplang aktif	69%
		Persentase anggota Linmas aktif	60%
3.	Meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui upaya pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan	Indeks Desa Membangun (IDM) di Kecamatan	0.6911
		Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat	100%
4.	Meningkatnya peran serta lembaga dalam pembangunan	Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	0.7894
		Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	0.6436
		Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	0.6407
5.	Terlaksananya penyaluran bantuan kepada masyarakat	Persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH, dan abntuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan	100%
6.	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan mengedepankan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan terhadap pelayanan kependudukan tepat waktu	75
		Persentase realisasi capaian RKPDes	80%
7.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan	Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	100%
8.	Terpenuhinya kebutuhan data dan informasi serta mendukung	Persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan	75%

	peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Persentase usulan Kecamatan yang masuk dalam RKPD Kabupaten	11%
9.	Terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa	Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib	92%
10.	Terwujudnya kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di wilayah Kecamatan	Pertumbuhan pemohon PATEN	100
11.	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan di Kecamatan	Persentase pelayanan perijinan tepat waktu	100%

B. Perjanjian Kinerja

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga akan terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (*outcome*), OPD Kecamatan Wedarijaksa berjanji akan mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja 2021 (*lampiran 2*), pada gilirannya mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab OPD Kecamatan Wedarijaksa.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan minimal di Kecamatan Wedarijaksa digunakan 2 indikator yang digunakan. *Pertama* persentase penyelesaian layanan administrasi perijinan terpadu Kecamatan dengan target 100% melalui Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan dan Pelayanan Publik

dan kedua, persentase penyelesaian layanan KTP dan KK dengan target 100 melalui Program Penataan Administrasi Kependudukan.

Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis meningkatnya kemandirian desa untuk mewujudkan pelayanan masyarakat, indikator yang digunakan adalah *pertama* jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang berpartisipasi dalam pembangunan desa dengan target 90 lembaga yang terdiri dari 5 lembaga (LPMD, PKK, Karang Taruna, RT dan RW) di 18 desa se-Kecamatan Wedarijaksa. *Kedua* Persentase penyerapan bantuan keuangan desa ditargetkan dapat diserap 100% di 18 Desa se-Kecamatan Wedarijaksa melalui Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan.

Sasaran strategis meningkatnya pendapatan daerah, indikatornya adalah persentase pelunasan PBB di 18 Desa se-Kecamatan Wedarijaksa ditargetkan lunas 100% melalui Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa.

Sebagai upaya mendukung tercapainya sasaran strategis meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat, diharapkan angka kriminalitas di wilayah Kecamatan Wedarijaksa *turun* melalui Program Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak direncanakan 18 TP. PKK Desa Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan.

Untuk mencapai sasaran strategis meningkatkan hasil perencanaan pembangunan indikatornya adalah jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Musrenbang Kecamatan ditargetkan sebanyak 36 usulan melalui Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

C. Rencana Anggaran

Sebagaimana yang telah dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD Kecamatan Wedarijaksa Tahun 2021, alokasi anggaran diprioritaskan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan dasar yang sesuai dengan kewenangan khususnya untuk urusan wajib. Anggaran Belanja OPD Kecamatan Wedarijaksa Tahun 2021 sebesar Rp. 2.536.780.000,- terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp. 2.521.780.000,-(atau 99% dari total anggaran) dan Belanja Modal sebesar Rp. 15.000.000,- (atau 0,1% dari total anggaran 2021). Setelah perubahan Anggaran Belanja OPD Kecamatan Wedarijaksa Tahun 2021 berkurang karena adanya refofusing

Belanja Operasi menjadi sebesar Rp. 2.485.189.000,- terdiri atas Belanja Pegawai Rp. 2.164.358.000,- (atau 87% dari total anggaran) dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 320.831.000,-(atau 13% dari total anggaran 2021).

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Alokasi Anggaran per Sasaran Pembangunan Tahun Anggaran

NO	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN	PERSENTASE ANGGARAN %
1	2	3	4
1.	Terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat di wilayah kecamatan	Rp. 28.922.800	31,9%
2.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban		
3.	Meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui upaya pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan	Rp. 28.323.400	31,2%
4.	Meningkatnya peran serta lembaga dalam pembangunan		
5.	Terlaksananya penyaluran bantuan kepada masyarakat		
6.	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan mengedepankan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	Rp. 2.951.750	3,2%
7.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan		
8.	Terpenuhinya kebutuhan data dan informasi serta mendukung peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Rp. 6.793.950	7,5%

9.	Terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa	Rp. 17.150.000	18,9%
10.	Terwujudnya kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di wilayah Kecamatan	Rp. 6.417.750	7%
11.	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan di Kecamatan		
	Jumlah	Rp. 90.559.650,-	3,7%
	Jumlah belanja pendukung	Rp. 2.394.629.350,-	96,3%
	Total belanja langsung	Rp. 2.485.189.000,-	100%

Pada tabel di atas, dapat dilihat pos belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja langsung program/kegiatan pendukung. Belanja langsung program/kegiatan pendukung sebesar Rp. 2.394.629.350,- sedangkan belanja langsung program/kegiatan utama sebesar Rp. 90.559.650 ,- dengan perincian sebagai berikut:

1. Pencapaian sasaran strategis 1 Terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat di wilayah kecamatan dan sasaran strategis 2 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban akan didukung melalui Program Koordinasi upaya Penelenggraan Ketentraman dan Ketertiban umum dengan anggaran sebesar Rp. Rp. 28.922.800
2. Pencapaian sasaran strategis 3 Meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui upaya pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan, sasaran strategis 4 Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan dan sasaran strategis 5 Terlaksananya penyaluran bantuan kepada masyarakat didukung melalui,-sasaran strategis 5 Terpenuhinya kebutuhan data untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan dengan Program Program peningkatan keberdayaan masyarakat desa dengan anggaran sebesar Rp. 28.323.400,-
3. Pencapaian sasaran strategis 6 Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan mengedepankan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayah Kecamatan, sasaran strategis 7 Terwujudnya kualitas pelayanan masyarakat untuk meningkatkan

ekonomi masyarakat di wilayah Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 2.951.750,-

4. Pencapaian sasaran strategis 8 Terpenuhinya kebutuhan data untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 6.793.950,
5. Pencapaian sasaran strategis 9 Terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa dengan anggaran sebesar Rp. 17.150.000,-
6. Pencapaian sasaran strategis 10 Pencapaian sasaran strategis 11 Terwujudnya kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di wilayah Kecamatan Meningkatkan kualitas pelayanan perijinan di Kecamatan dengan anggran Rp. 6.417.750,-

Pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara Bupati Pati selaku Atasan dan Camat Wedarijaksa selaku Bawahan untuk mewujudkan target kinerja berdasarkan sumber daya yang dimiliki SKPD Kecamatan Wedarijaksa dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja dapat dilihat dalam lampiran.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah secara periodik.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas, klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel, harus dilakukan pengukuran kinerja dengan cara membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja dapat menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah. Hasil pengukuran kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- 85 s/d 100 : Sangat Berhasil (SB)
- 70 s/d < 85 : Berhasil (B)
- 55 s/d < 70 : Cukup Berhasil (CB)
- 0 s/d < 55 : Tidak Berhasil (TB)

Hasil pengukuran target dengan realisasi masing-masing indikator sesuai dengan sasaran dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja Kecamatan Wedarijaksa
Tahun 2021

NO	Tujuan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi
1.	Terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat di wilayah kecamatan	Persentase penanganan pelanggaran K3 di Kecamatan	100%

2.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	Persentase pos Kamplang aktif	50%
		Persentase anggota Linmas aktif	54%
3.	Meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui upaya pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan	Indeks Desa Membangun (IDM) di Kecamatan	0,7100
		Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat	100%
4.	Meningkatnya peran serta lembaga dalam pembangunan	Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	0.802
		Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	0,6565
		Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	0,7074
5.	Terlaksananya penyaluran bantuan kepada masyarakat	Persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH, dan abntuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan	100%
6.	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan mengedepankan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan terhadap pelayanan kependudukan tepat waktu	81,50%
		Persentase realisasi capaian RKPDes	100%
7.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan	Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	100%
8.	Terpenuhinya kebutuhan data dan informasi serta mendukung peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan	67%
		Persentase usulan Kecamatan yang masuk dalam RKPDes Kabupaten	8
9.	Terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa	Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib	100%

10.	Terwujudnya kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di wilayah Kecamatan	Pertumbuhan pemohon PATEN	100
11.	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan di Kecamatan	Persentase pelayanan perijinan tepat waktu	100%

B. ANALISIS DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Analisis atas capaian kinerja dari tiap-tiap indikator kinerja untuk mewujudkan tiap-tiap sasaran strategis sebagai berikut :

➤ **Sasaran 1**

Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat, kinerjanya sangat berhasil dengan capaian 100%

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1. Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat			
1. Angka Kriminalitas (Tawuran/Konflik antar kelompok masyarakat)	≤ 1	0	100%

2. Tawuran/Konflik antar kelompok masyarakat

Pada Tahun 2021 tidak terdapat kejadian kriminalitas tawuran/konflik antar kelompok masyarakat di wilayah Kecamatan Wedarijaksa. Pencapaian kinerja meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat dengan indikator angka kriminalitas terkait dengan tawuran/konflik antar kelompok masyarakat di wilayah Kecamatan Wedarijaksa mencapai 100%.

Kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan oleh Tim Kecamatan, Koramil dan Polsek merupakan bentuk preventif untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Tabel 3.4
Perbandingan Kinerja Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Satuan	2020			2021		
			T	R	%	T	R	%
1	Angka Kriminalitas (Tawuran/Konflik antar kelompok masyarakat)	Kejadian	≤ 1	0	100	≤ 1	0	100

➤ **Sasaran 2**

- Sasaran meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban

Tolok ukur capaian sasaran meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban pada tahun 2020 dengan tahun sebelumnya dapat dilihat di pencapaian sasaran pada 2 (dua) Indikator yaitu Persentase pos kampling aktif dan Persentase anggota Linmas aktif. Uraian pencapaian sasaran dan indikator kinerja adalah sebagai berikut:

TABEL 3.14

PERBANDINGAN PENCAPAIAN KINERJA

Sasaran: Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban

No	Indikator Kinerja	Tahun 2020	Capaian Kinerja thn 2020 (%)	Tahun 2021	Capaian Kinerja thn 2021(%)	Target Akhir Renstra
----	-------------------	------------	------------------------------	------------	-----------------------------	----------------------

		Tar get	Reali sasi		Tar get	Reali sasi		
1	Persentase pos kamplang aktif	66	23	38%	69	50	70%	72%
2	Persentase anggota Linmas aktif	70	51	85%	60	40	70%	77%

Berdasar data tersebut diatas, bahwa capaian indikator kinerja Persentase pos kamplang aktif tahun 2020 sebesar 4,3% dan capaian tahun 2020 sebesar 38%. Capaian tahun 2020 didapat dari jumlah pos kamplang aktif sebanyak 23 dibagi jumlah seluruh pos kamplang yang ada sebanyak 97 dikali 100%. Sedangkan yang satu adalah indikator Persentase anggota Linmas aktif berhasil mencapai 113,8% karena dari target sebesar 65% terealisasi sebesar 74%. Capaian ini didapat dari jumlah Linmas yang aktif sebanyak 300 orang dibagi jumlah Linmas yang ada sebanyak 403 orang dikalikan 100%.

Sedangkan capaian tahun 2019 didapat dari jumlah pos kamplang aktif sebanyak 23 dibagi jumlah seluruh pos kamplang yang ada sebanyak 97 dikali 100%. Sedangkan yang satu adalah indikator Persentase anggota Linmas aktif berhasil mencapai 100% karena dari target sebesar 60% terealisasi sebesar 51%. Capaian ini didapat dari jumlah Linmas yang aktif sebanyak 225 orang dibagi jumlah Linmas yang ada sebanyak 442 orang dikalikan 100%.

➤ **Sasaran 3**

Meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui upaya pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan kinerjanya berhasil dengan capaian indikasi rata-rata 100%

1. Persentase Penyerapan Bantuan Keuangan Desa

Pengukuran kinerja penyerapan bantuan keuangan desa selama Tahun 2020 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.5
Pengukuran Kinerja Persentase Penyerapan Bantuan Keuangan Desa
Tahun 2021

No	Jenis	Jumlah		
		Target	Realisasi	Capaian
1	ADD	5.675.038.000,-	5.675.038.000,-	100%
2	Dana Desa	18.899.376.000,-	18.899.376.000,-	100%
3	Bantuan Keuangan Propinsi	4.536.000.000,-	4.536.000.000,-	100%
4	Bantuan Keuangan Kabupaten	2.345.000.000,-	2.345.000.000,-	100%

Persentase penyerapan bantuan keuangan desa tahun 2020 sampai 2021 sebagai berikut :

Tabel 3.6
Perbandingan Kinerja Persentase Penyerapan Bantuan Keuangan Desa Tahun 2019 s.d 2021

No.	Indikator Kinerja	TH. 2020			TH.2021			Targ et RPJ MD
		T	R	C	T	R	C	
1	Persentase penyerapan bantuan keuangan desa	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Target penyerapan bantuan keuangan desa sebesar 100% pada tahun 2021

terrealisasi 100%. Apabila dibandingkan tahun sebelumnya belum mencapai 100%.

Bantuan PKH, Rastra dan Keagamaan

No	Jenis	Jumlah		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Bantuan Rastra	8.230	8.230	100%
2	Bantuan Keagamaan	10.063	10.063	100%

2. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang berpartisipasi dalam pembangunan desa

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa mencapai 100% telah sesuai dengan target yang diharapkan. Berikut ini data jumlah lembaga kemasyarakatan desa se Kecamatan Wedarijaksa :

Tabel 3.7
Data Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa
se – Kecamatan Wedarijaksa Tahun 2021

No	Jenis Lembaga	Tahun 2021
1	PMD	18
2	KARANG TARUNA	18
3	PKK	18
4	RT	339
5	RW	58

Lembaga kemasyarakatan desa yang terdiri dari LPMD, Karang Taruna, PKK, RW dan RT telah berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes), pelaksanaan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.

Sebagai evaluasi capaian kinerja, berikut ini perbandingan dengan tahun sebelumnya :

Tabel 3.8
Perbandingan Kinerja Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa
Yang Berpartisipasi Dalam Pembangunan Desa
se – Kecamatan Wedarijaksa Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	TH. 2020			TH. 2021		
		T	R	C	T	R	C
1	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang berpartisipasi dalam pembangunan desa	78	78	100%	90	90	100%

Capaian kinerja Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang berpartisipasi dalam pembangunan desa dapat tetap dipertahankan seperti tahun sebelumnya dengan target dan realisasi yang sama.

➤ **Sasaran 4**

Meningkatnya peran serta lembaga dalam pembangunan

Meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui upaya pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan, *kinerjanya berhasil dengan capaian indikasi 100%*.

Tabel 3.9
Pengukuran Kinerja Meningkatnya Kemandirian Desa
untuk Mewujudkan Pelayanan Masyarakat
Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
<i>Meningkatnya kemandirian desa untuk mewujudkan pelayanan masyarakat</i>			
1. Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang berpartisipasi dalam pembangunan desa	90 lembaga	90 lembaga	100%
2. Persentase penyerapan bantuan keuangan desa	100%	100%	100%

3. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang berpartisipasi dalam pembangunan desa

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa mencapai 100% telah sesuai dengan target yang diharapkan. Berikut ini data jumlah lembaga kemasyarakatan desa se Kecamatan Wedarijaksa :

Tabel 3.10
Data Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa
se – Kecamatan Wedarijaksa Tahun 2021

No	Jenis Lembaga	Tahun 2021
1	PMD	18
2	KARANG TARUNA	18
3	PKK	18
4	RT	339
5	RW	58

Lembaga kemasyarakatan desa yang terdiri dari LPMD, Karang Taruna, PKK, RW dan RT telah berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes), pelaksanaan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.

Sebagai evaluasi capaian kinerja, berikut ini perbandingan dengan tahun sebelumnya :

Tabel 3.9
Perbandingan Kinerja Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa Yang Berpartisipasi Dalam Pembangunan Desa se – Kecamatan Wedarijaksa Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	TH. 2020			TH. 2021		
		T	R	C	T	R	C
1	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang berpartisipasi dalam pembangunan desa	78	78	100%	78	78	100%

Capaian kinerja Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang berpartisipasi dalam pembangunan desa dapat tetap dipertahankan seperti tahun sebelumnya dengan target dan realisasi yang sama

➤ **Sasaran 5**

Terlaksananya penyaluran bantuan kepada masyarakat

Persentase Penyerapan Bantuan Keuangan Desa Pengukuran kinerja penyerapan bantuan keuangan desa selama Tahun 2021 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.12
Pengukuran Kinerja Persentase Penyerapan Bantuan Keuangan Desa Tahun 2021

No	Jenis	Jumlah		
		Target	Realisasi	Capaian
1	ADD	5.675.038.000,-	5.675.038.000,-	100%
2	Dana Desa	18.899.376.000,-	18.899.376.000,-	100%
3	Bantuan Keuangan Propinsi	4.536.000.000,-	4.536.000.000,-	100%
4	Bantuan Keuangan Kabupaten	2.345.000.000,-	2.345.000.000,-	100%

Persentase penyerapan bantuan keuangan desa tahun 2020 sampai 2021 sebagai berikut :

Tabel 3.13
Perbandingan Kinerja Persentase Penyerapan Bantuan Keuangan Desa Tahun 2020 s.d 2021

No.	Indikator Kinerja	TH. 2020			TH.2021			Targ et RPJ MD
		T	R	C	T	R	C	
1	Persentase penyerapan bantuan keuangan desa	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Target penyerapan bantuan keuangan desa sebesar 100% pada tahun 2021

terrealisasi 100%. Apabila dibandingkan tahun sebelumnya belum mencapai 100%.

Bantuan PKH, Rastra dan Keagamaan

No	Jenis	Jumlah		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Bantuan Rastra	8.230	8.230	100%
2	Bantuan Keagamaan	10.063	10.063	100%

➤ **Sasaran 6**

Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan mengedepankan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayah Kecamatan

1. Persentase penyelesaian pelayanan perijinan di Kecamatan

Target penyelesaian Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan (PATEN) 100% dapat tercapai 100% pada tahun 2021. Data layanan perijinan Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 3.14
Data Pelayanan Perijinan PATEN
Kecamatan Wedarijaksa

No	Jenis layanan	Jumlah		
		Permohonan	Terselesai kan	Capaian

	Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	0	0	0%
	Surat Ijin Usaha Perdagangan Mikro (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan IUMK	55	55	100%
	Ijin Reklame	0	0	0%
	Ijin Menutup Jalan	0	0	100%

➤ **Sasaran 7**

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan

Tabel 3.15
Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Sesuai Standar Pelayanan Minimal
Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1. Persentase penyelesaian pelayanan perijinan di Kecamatan	%	100%	100%	100%
2. Persentase penyelesaian pelayanan KTP dan KK	%	100%	100%	100%

2. Persentase penyelesaian pelayanan perijinan di Kecamatan

Target penyelesaian Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan (PATEN) 100% dapat tercapai 100% pada tahun 2021. Data layanan perijinan Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 3.16
Data Pelayanan Perijinan PATEN
Kecamatan Wedarijaksa

No	Jenis layanan	Jumlah		
		Permohonan	Terselesaikan	Capaian
	Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	0	0	0%
	Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan IUMK	0	0	0%
	Ijin Reklame	0	0	0%
	Ijin Menutup Jalan	0	0	100%
	Ijin Pengumpulan Dana	0	0	0%

Perbandingan kinerja untuk penyelesaian PATEN s.d tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 3.17
Perbandingan kinerja
Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan (PATEN)
sampai dengan Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	TH. 2020			TH. 2021			Target RPJMD
			T	R	C	T	R	C	
1.	Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan (PATEN)	%	100	100	100	100	100	100	100

Capaian kinerja persentase penyelesaian pelayanan perijinan di Kecamatan dapat dipertahankan 100% sesuai target yang ditetapkan.

3. Persentase penyelesaian pelayanan KTP dan KK

Persentase penyelesaian pelayanan KTP dan KK mencapai 100% telah sesuai dengan target sasaran yang ditetapkan. Data Layanan KTP dan KK dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.18
Data Pelayanan KTP dan KK
Kecamatan Wedarijaksa

No.	Jenis layanan	2021			
		Permohonan	Tercetak	Dalam Proses	Capaian
	KTP	1.422	1.422	0	100%
	KK Baru/Rubah	2.412	2.412	0	100%

Pemohon KTP pada Tahun 2021 tercatat sebanyak 1.422 orang telah dilayani 100% dengan rincian jumlah KTP yang telah tercetak sebanyak 1.422 buah. Sedangkan permohonan cetak KK baru maupun rubah tercatat sebanyak 2.412 buah terlayani 100% dengan rincian 2.412 KK telah tercetak ,

Secara keseluruhan layanan KTP, KK selama Tahun 2021 dapat tercapai 100%. Hal ini dikarenakan adanya dukungan sarana dan prasarana kependudukan serta meningkatnya kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi kependudukan.

Perbandingan kinerja Persentase Penyelesaian Pelayanan KTP dan KK Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 3.19
Perbandingan kinerja
Persentase Penyelesaian Pelayanan KTP dan KK
sampai dengan Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	TH. 2020			TH. 2021		
		T	R	C	T	R	C
1.	Persentase Penyelesaian Pelayanan KTP dan KK	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Capaian kinerja Persentase Penyelesaian Pelayanan KTP dan KK dari Tahun 2020 s.d 2021 dapat dipertahankan 100% sesuai target yang telah ditetapkan. Keberhasilan atas pencapaian sasaran ini disebabkan karena adanya rencana, jadwal dan komitmen yang baik dari instansi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

➤ **Sasaran 8**

Terpenuhinya kebutuhan data dan informasi serta mendukung peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan
Persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan

Tabel 3.20
Data Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk
Kecamatan Wedarijaksa Tahun 2021

No.	Desa	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Penduduk
1	Bumiayu	311	4.563
2	Margorejo	230	1.855
3	Sukoharjo	348	6.533
4	Tawangharjo	237	2.670
5	Ngurensiti	271	3.582
6	Bangsalrejo	160	2.278
7	Tluwuk	423	2.683
8	Sidoharjo	180	2.350
9	Ngurenrejo	174	3.212
10	Jontro	118	2.969
11	Panggungroyom	206	4.570
12	Suwaduk	321	3.516
13	Wedarijaksa	278	8.175
14	Pagerharjo	206	3.966
15	Jatimulyo	101	2.335
16	Jetak	54	1.722
17	Kepoh	201	1.834
18	Tlogoharum	266	4.712
	Jumlah	4.085	63.525

Sampai Tahun 2021 wilayah administrasi Kecamatan Wedarijaksa terdiri dari 18 Desa, 25 dukuh, 58 RW dan 339 RT. Semua desa masuk ke dalam kategori Desa Swasembada. Jumlah penduduk terbanyak adalah Desa Wedarijaksa sebesar 8.175 jiwa. Adapun desa

dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu Desa Jetak sebesar 1.722 jiwa.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1. Peningkatan hasil perencanaan pembangunan			
1. Jumlah usulan Masyarakat yang diakomodir dalam Musrenbang Tingkat Kecamatan	11%	08 usulan	90%

Data perbandingan Jumlah usulan masyarakat yang diakomodasi dalam Musrenbang tingkat Kecamatan sebagai berikut :

Tabel 3.21
Perbandingan Jumlah usulan masyarakat yang diakomodasi dalam Musrenbang tingkat Kecamatan

No	Indikator	2020			2021		
		T	R	C	T	R	C
1	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Musrenbang Kecamatan	9	11	122%	11	8	90%

Sebagai upaya mendukung mekanisme perencanaan pembangunan di Kabupaten Pati, Kecamatan Wedarijaksa telah melaksanakan proses perencanaan pembangunan secara partisipatif yang dimulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Pelaksanaan Penjaringan Aspirasi Masyarakat hingga Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pati Tahun 2021 dengan melibatkan stakeholder pembangunan di Kecamatan, baik OPD, tokoh masyarakat, kalangan dunia usaha, serta asosiasi/organisasi profesi.

Jumlah peserta Penjaringan Aspirasi Masyarakat sebanyak 80 orang terdiri dari Delegasi Desa hasil Musrenbangdes, Tokoh Masyarakat dan Stakeholder Pembangunan di Kecamatan secara Zoom Meeting

Target jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Musrenbang Kecamatan Wedarijaksa Tahun 2021 sebanyak 11 usulan terealisasi 8 usulan atau tercapai 90%.

➤ **Sasaran 9**

Terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa

Tabel 3.13
Realisasi PBB-P2 Kecamatan Wedarijaksa
Tahun 2021

No	Desa	Target	Realisasi				Capaian
		Rp	TW I	TW II	TW III	TW IV	%
1	BUMIAYU	Rp 89.919.877	Rp 7.140.918	Rp 22.176.973	Rp 89.919.877		100
2	MARGOREJO	Rp 55.574.362	Rp 16.984.552	Rp 55.574.362	Rp 55.574.362		100
3	TAWANGHARJO	Rp 58.322.819	Rp 9.901.193	Rp 25.607.777	Rp 58.322.819		100
4	SUKOHARJO	Rp 110.571.888	Rp 27.842.513	Rp 38.360.299	Rp 110.571.888		100
5	SUWADUK	Rp 46.882.385	Rp 10.483.034	Rp 10.575.299	Rp 46.882.385		100
6	PANGGUNGROYOM	Rp 51.530.012	Rp 10.466.621	Rp 30.326.183	Rp 51.530.012		100
7	JONTRO	Rp 39.314.711	Rp 12.445.767	Rp 20.469.703	Rp 39.314.711		100
8	NGURENSITI	Rp 64.744.855	Rp 20.895.976	Rp 64.744.855	Rp 64.744.855		100
9	BANGSALREJO	Rp 29.769.875	Rp 10.357.670	Rp 13.403.724	Rp 29.769.875		100
10	TLUWUK	Rp 69.737.647	Rp 7.971.263	Rp 69.737.647	Rp 69.737.647		100
11	KEPOH	Rp 34.939.662	Rp 3.674.859	Rp 8.053.116	Rp 34.939.662		100
12	SIDOHARJO	Rp 36.206.513	Rp 11.399.192	Rp 16.347.011	Rp 36.206.513		100
13	NGURENREJO	Rp 40.233.812	Rp 5.950.280	Rp 17.612.219	Rp 40.233.812		100
14	PAGERHARJO	Rp 54.791.247	Rp 51.841.034	Rp 54.791.247	Rp 54.791.247		100
15	WEDARIJAKSA	Rp 132.477.541	Rp 13.542.294	Rp 19.934.148	Rp 132.477.541		100

16	JATIMULYO	Rp 31.464.657	Rp 4.014.058	Rp 4.968.245	Rp 31.464.657		100
17	JETAK	Rp 20.492.257	Rp 6.391.428	Rp 8.392.867	Rp 20.492.257		100
18	TLOGOHARUM	Rp 59.606.469	Rp 4.916.755	Rp 11.314.766	Rp 59.606.469		100
	JUMLAH TOTAL	Rp 1.026.580.589	Rp 236.219.407	Rp 492.390.441	Rp 1.026.580.589		100

Target penerimaan PBB-P2 Kecamatan Wedarijaksa Tahun 2021 sebesar Rp. 1.026.580.589,- terealisasi sebesar Rp. 1.026.580.589,- atau 100% dari baku ketetapan pajak PBB-P2. Realisasi pada sampai dengan Triwulan IV mencapai 100 % untuk 18 Desa di wilayah Kecamatan Wedarijaksa pada bulan September 2021.

Tabel 3.14

Perbandingan kinerja persentase pelunasan PBB
Kecamatan Wedarijaksa Tahun 2020 s.d 2021

No	Indikator Kinerja	2020			2021		
		Target	Realisasi	C	Target	Realisasi	C
1	Baku PBB	954.559.842	954.559.842	100	1.026.580.589	1.026.580.589	100

Tabel 3.10

Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib
Tahun 2021

No	Jenis	Jumlah		
		Target	Realisasi	Capaian
1	ADD	5.675.038.000,-	5.675.038.000,-	100%
2	Dana Desa	18.899.376.000,-	18.899.376.000,-	100%
3	Bantuan Keuangan Propinsi	4.536.000.000,-	4.536.000.000,-	100%
4	Bantuan Keuangan Kabupaten	2.345.000.000,-	2.345.000.000,-	100%

➤ **Sasaran 10**

Terwujudnya kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di wilayah Kecamatan

Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan (PATEN) sampai dengan Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	TH. 2020			TH. 2021			Target RPJMD
			T	R	C	T	R	C	
1.	Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan (PATEN)	%	100	100	100	100	100	100	100

Capaian kinerja persentase penyelesaian pelayanan perijinan di Kecamatan dapat dipertahankan 100% sesuai target yang ditetapkan.

➤ **Sasaran 11**

Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan di Kecamatan

No	Jenis layanan	Jumlah		
		Permohonan	Terselesaikan	Capaian
	Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	0	0	0%
	Surat Ijin Usaha Perdagangan Mikro (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan IUMK	55	55	100%
	Ijin Reklame	0	0	0%

	Ijin Menutup Jalan	0	0	100%
	Ijin Pengumpulan Dana	0	0	0%

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas keuangan yang termasuk aspek akuntabilitas material dengan fokus pada efisiensi pengalokasian dana pada kegiatan. Dana kegiatan ini merupakan indikator input (masukan), yang jika kinerja keluarannya mencapai 100%, semakin tinggi realisasi dananya menunjukkan semakin rendah pencapaian kerjanya.

Pada tahun 2021 dari total anggaran Rp. 2.485.189.000,- jumlah anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.164.358.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.953.232.120,- (90,24%) Sedangkan jumlah anggaran belanja langsung sebesar Rp. 320.831.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 293.277.615,- (91,41%).

Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja utama ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain SDM (pemerintah, masyarakat, dan pelaku pembangunan lainnya), anggaran, faktor alam, dan sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota. Dari analisis 11 sasaran, terdapat 17 indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolok ukur pada tahun 2022, capaian indikator kinerja selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Angka Kriminalitas sebesar 3,9%
2. Persentase Pos kamplang aktif sebesar 50%
3. Persentase Anggota Linmas Aktif sebesar 54%
4. Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Berprestasi sebesar 67%
5. Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat sebesar 100%
6. Persentase usulan masyarakat yang masuk dalam APBD Kabupaten sebesar 90%
7. Persentase lembaga kemasyarakatan aktif sebesar 73%
8. Persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan sebesar 100%
9. Persentase usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang

Kabupaten sebesar 90%

10. Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan sebesar 81.50%
11. Persentase Realisasi Capaian RKPDes sebesar 100%
12. Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu sebesar 100%
13. Persentase pelayanan perijinan tepat waktu sebesar 100%
14. Persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan sebesar 67%
15. Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib sebesar 100%

Keberhasilan pencapaian sasaran – sasaran strategis secara umum disebabkan :

1. Penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran berdasar skala prioritas sesuai dengan prinsip efisiensi serta efektifitas ;
2. Memperhatikan hasil evaluasi program/kegiatan pada tahun anggaran sebelumnya;
3. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah direncanakan ;
4. Penetapan indikator sasaran secara rinci pada masing - masing kegiatan
5. Melakukan koordinasi dengan SKPD baik di tingkat Kecamatan maupun Kabupaten.

Walaupun Pemerintah Kecamatan Trangkil berhasil mencapai sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, masih ada kendala/hambatan yang dihadapi dalam upaya mencapai sasaran strategis tersebut yaitu :

1. Kekurangan jumlah sumber daya manusia (SDM) yang ada di Kecamatan Trangkil.
2. Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan tidak sama dengan perencanaan.
3. Keterbatasan sarana dan prasarana yang ada.

Sedangkan dalam rangka untuk meningkatkan kinerja, Kecamatan Wedarijaksa mempunyai beberapa strategi sebagai berikut.

1. Melakukan evaluasi program dan kinerja dengan mendasarkan pada indikator, pengukuran kinerja, serta sasarannya;
2. Menetapkan target sasaran secara logis dan realistis;
3. Merencanakan kegiatan, anggaran dan jadwal waktu pelaksanaan berdasarkan segi ekonomis, efisiensi dan efektifitas;

4. Meningkatkan koordinasi antar PD dengan lebih optimal;
5. Pengembangan kualitas Sumber Daya Aparatur.

Realisasi APBD Kecamatan Wedarijaksa Tahun 2021 sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.23
Realisasi Anggaran dan Belanja Daerah
Kecamatan Wedarijaksa
Tahun 2021

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Capaian
		Rp.	Rp.	(%)
1	Pendapatan	-		
2	Belanja	2.485.189.000	2.246.509.735	90.40
3	Transfer	-	-	
4	Surplus/Defisit	-	-	
5	Pembiayaan Netto	-	-	
6	SILPA	-	-	

Keberhasilan/Tidak tercapainya kinerja keuangan terlihat pada realisasi belanja yaitu sebesar Rp. 2.246.509.735,- atau 90,40% dari anggaran sebesar Rp. 2.485.189.000,- sehingga sisa lebih pembiayaan tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 238.679.265,-

Penghematan 03% tersebut mencerminkan bahwa proses perencanaan anggaran dengan rencana kegiatan yang akan dicapai sudah cukup baik dalam rangka usaha-usaha untuk memaksimalkan pencapaian target kinerja.

Tabel 3.24
Perbandingan Realisasi Anggaran dan Belanja Daerah
Kecamatan Wedarijaksa
Tahun 2018 s.d 2021

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Capaian	Penghematan
		Rp.	Rp.	(%)	(%)
1	Th. 2018	2.745.204.000	2.470.839.149	90,01	9,99

2	Th. 2019	2.703.734.000	2.570.834.707	95,08	4,92
3	Th. 2020	2.591.225.000	2.576.082.089	96,47	03
4	Th. 2021	2.485.189.000	2.246.509.735	90.40	

Berdasarkan perbandingan anggaran dan realisasi APBD Kecamatan Wedarijaksa Tahun 2018 sampai dengan 2021 tersebut dalam tabel di atas dapat dilihat adanya perubahan penghematan anggaran dimana telah terjadi penurunan prosentase terhadap penghematan anggaran dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya peningkatan serapan anggaran disbanding tahun lalu.

BAB IV

P E N U T U P

Dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Wedarijaksa pada Tahun 2020 ini, ada beberapa hal yang dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Kesimpulan

Keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran secara umum disebabkan :

1. Penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran berdasar skala prioritas sesuai dengan prinsip efisiensi serta efektifitas;
2. Memperhatikan hasil evaluasi program/kegiatan pada tahun anggaran sebelumnya;
3. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah direncanakan;
4. Penetapan indikator kinerja utama secara rinci pada masing-masing kegiatan;
5. Melakukan koordinasi dengan OPD baik di tingkat Kecamatan maupun Kabupaten.

2. Strategi Peningkatan Kinerja

Strategi untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Wedarijaksa dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan setiap akhir tahun anggaran;

- b. Menindaklanjuti setiap hasil evaluasi untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana program dan kegiatan tahun anggaran selanjutnya;
- c. Pengajuan tambahan anggaran untuk mengcover program-program lain yang dapat menunjang dalam peningkatan kinerja;
- d. Meningkatkan koordinasi antar OPD dengan lebih optimal;
- e. Optimalisasi fungsi perencanaan, koordinasi dan evaluasi;
- f. Pengembangan kualitas Sumber Daya Aparatur.

3. Pemecahan Masalah

Langkah-langkah yang diperlukan dalam pemecahan masalah adalah sebagai berikut:

- Melakukan evaluasi program dan kegiatan;
- Berupaya meningkatkan kualitas SDM yang ada dengan mengikutsertakan pada diklat - diklat maupun pembinaan - pembinaan;
- Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada untuk menunjang kegiatan;
- Mengadakan pembinaan administrasi Desa secara bertahap di 18 Desa se Kecamatan Wedarijaksa;

Wedarijaksa, Februari 2022


CAMAT WEDARIJAKSA
EKO URWANTORO, S.Sos
A Pembina Tk. I
NIP. 19700705 199101 1 002